

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan kerja bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub-sistem pemerintahan negara yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (*Deddy S dan Dadang S, 2001, 168*).

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah pusat mengeluarkan undang-undang sebagai perwujudan penyelenggaraan otonomi daerah.

- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengandung makna bahwa pelaksanaan otonomi daerah nantinya diharapkan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota dapat mengatur kewenangan dan kekuasaan dalam membentuk dan melaksanakan berdasarkan aspirasi, prakarsa dan keputusan daerah semaksimal mungkin. Guna menyongsong terealisasinya harapan yang dimaksud, maka diperlukan kesiapan dana (finansial) yang cukup besar serta peningkatan sumber daya manusianya agar mengelola keuangan dan penataan pemerintahan dapat berlangsung dengan lancar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Pasal 21 tentang Hak dan Kewajiban Daerah, bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya..
2. Memilih pimpinan daerah.
3. Mengelola aparatur daerah.
4. Mengelola kekayaan daerah.
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.

Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, dimana PAD sendiri terdiri atas: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan terdiri atas: dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Lain-lain pendapatan yang terdiri atas: pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa retribusi dikenakan yang bersangkutan secara langsung mendapatkan keuntungan dari suatu pelayanan tertentu, sehingga retribusi tersebut dikenakan sebagai bentuk imbalan yang digunakan untuk membiayai baik sebagian atau seluruh pelayanan yang diberikan.

Kabupaten Bantul merupakan daerah yang sedang berkembang, sehingga dibutuhkan banyak sumber penerimaan untuk membiayai pembangunan daerahnya, sehingga pemerintah Kabupaten Bantul berusaha untuk meningkatkan pendapatan yang merupakan pendapatan asli daerah, mengingat masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga

perlu adanya usaha meningkatkan pendapatan asli daerah yang diantaranya dengan meningkatkan realisasi penerimaan retribusi daerah.

Di Kabupaten Bantul sendiri penerimaan retribusi terutama retribusi pasar dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 mengalami peningkatan walaupun peningkatan tersebut kadang tidak sesuai dengan target pemerintah. Peningkatan tersebut sebesar 10 % yang sebagian besar dipengaruhi oleh jumlah pedagang yang dari tahun ke tahun meningkat. Selain itu banyak hal-hal yang juga mempengaruhi peningkatan retribusi pasar di kabupaten Bantul yang mana nantinya penulis akan menelitinya.

**Tabel 1.1.**

**Realisasi dan Target Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Bantul  
Tahun 2000-2004**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan (Rp)</b>	<b>Target Penerimaan (Rp)</b>
2000	689.937.950	675.000.000
2001	574.724.340	550.000.000
2002	830.073.960	791.176.000
2003	882.883.410	957.067.220
2004	965.943.135	957.069.180

*Sumber: Bantul dalam Angka 2004*

Dengan melihat permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti besarnya potensi, dan efektivitas retribusi pasar. Untuk itu penulis mengambil judul **“Potensi dan Efektivitas Pungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul tahun 2000 - 2004”**.

## **I.2. Rumusan Masalah**

1. Seberapa besar retribusi pasar di Kabupaten Bantul dari tahun 2000- 2004?
2. Seberapa besar tingkat efektivitas pungutan retribusi pasar di Kabupaten Bantul dari tahun 2000 – 2004?
3. Seberapa besar tingkat pertumbuhan retribusi pasar di Kabupaten Bantul dari tahun 2000 – 2004?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis potensi retribusi pasar di Kabupaten Bantul dari tahun 2000 - 2004.
2. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pungutan retribusi pasar di Kabupaten Bantul dari tahun 2000 – 2004.
3. Untuk menganalisis tingkat pertumbuhan retribusi pasar di Kabupaten Bantul dari tahun 2000– 2004.

## **I.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi bagi pemerintah Kabupaten Bantul akan menjadi bahan pembuatan kebijakan dimasa yang akan datang dalam mengelola pungutan retribusi pasar, khususnya dalam penetapan target retribusi pasar, sehingga dapat meningkatkan PAD untuk menunjang kelancaran pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

## **I.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

### **BAB II TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN**

Bab ini merupakan gambaran secara umum subyek penelitian. Dilakukan dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai wacana pemahaman secara makro yang berkaitan dengan penelitian.

### **BAB III KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang pendokumentasian dan pengkajian hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. Dari proses ini ditemukan kelemahan/kekurangan pada penelitian yang lalu sehingga dapat dijelaskan dimana letak hubungan, perbedaan maupun posisi penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu sekaligus dihindari publikasi.

### **BAB IV LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti.

## BAB V METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

## BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisis statistik. Kalau ternyata hasil penelitian secara keseluruhan atau sebagian baik sesuai dengan teori ataupun harapan umum yang berlaku, maka peneliti harus memberikan penjelasan mengenai bagaimana hal tersebut dapat terjadi.

## BAB VII SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pada bagian simpulan berisi tentang simpulan-simpulan yang langsung diturunkan dari sesi diskusi dan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya. Sedang pada bagian implikasi muncul sebagai hasil dari simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah sehingga dari sini dapat ditarik benang merah apa implikasi dari teoritis penelitian ini.